

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KOTA BINJAI

**O L E H
ERNIWATI
121801007**

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang memiliki tujuan yaitu untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru serta meningkatkan profesionalitas guru.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru SMA Negeri terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Binjai”.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA Negeri Kota Binjai masih belum terlaksana secara efektif. Masih banyak guru yang belum benar-benar mengerti prosedur dan mekanisme sertifikasi guru. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru masih belum optimal dilakukan di SMA Negeri di Kota Binjai. Begitupun Pihak Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah belum mampu memberi solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh guru, terutama dalam merespon aturan yang selalu berubah hampir setiap tahunnya. Berdasarkan keberperaan empat unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan, setiap unsur dapat dipenuhi walaupun belum sempurna. Masih banyak kekurangan dalam unsur komunikasi dan struktur birokrasi. Penyampaian pesan yang tidak sempurna karena banyak alur yang harus dilalui dan ketidakjelasan pesan membuat guru bingung akan program yang sebenarnya. SOP yang tidak konsisten, yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya menyulitkan guru untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang selalu baru. Ketidaktepatan keempat unsur tadi menghambat proses implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri Kota Binjai.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sertifikasi, Guru

ABSTRACT

TEACHER CERTIFICATION POLICY IMPLEMENTATION IN THE STATE HIGH SCHOOL IN THE CITY BINJAI

**O L E H
ERNIWATI
121801007**

Teachers, as professionals, have accrued to basic education , secondary education, and early childhood education in formal education are appointed in accordance with statutory regulations . On the basis of the Law No. 20 Year 2003 on National Education System Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, the issuance of Regulation No. 18 Year 2007 on certifications for Teachers which has the purpose of which is to determine the feasibility of teachers in carrying out duties as an agent of learning and achieve national education goals , improve the process and quality of education, enhance the dignity of teachers and to improve the professionalism of teachers.

The issues raised in this study is "How the implementation of State High School teacher certification policies towards improving the quality of education in the city of Binjai".

After doing research and discussion, it is known Teacher Certification Policy Implementation in SMA Binjai City still has not been implemented effectively . There are many teachers who do not really understand the procedures and mechanisms for teacher certification . Teacher certification policy implementation has been suboptimal conducted in high schools in Binjai City. So is The Binjai City Department of Education as policy implementers at the local level have not been able to provide the best solution to the problems faced by teachers, particularly in response to the ever-changing rules almost every year. Based keberperaan four elements critical success of policy implementation, each element can be satisfied even if not perfect . There are still many shortcomings in communication and bureaucratic structure elements . Delivery of messages is not perfect because a lot of grooves that must be passed and vagueness messages confused teacher will make the actual program . SOPs are not consistent , which is always changing every year make it difficult for teachers to adjust to the new rules always . The fourth element was the imperfections impede policy implementation process of teacher certification in SMA Binjai City .

Keywords : Implementation , Policy , Certification , Teacher